



# Masih Proses Pengajuan Serat Kekancangan

## Pembangunan Hutan Kota di Eks TKP ABA Ditarget Selesai Tahun Ini

**JOGJA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIJ) menargetkan proyek pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai hutan kota di eks Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) bisa selesai tahun ini. Proses pembangunannya pun masih di tahap pengajuan serat kekancangan.

Kini, proses pengajuan serat kekancangan masih dilakukan. Ditargetkan akan turun pada Februari. "Dalam waktu dekat Insyaa Allah bisa turun. Semoga bisa turun di Februari," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo kemarin (1/2).

Setelah mengantongi serat kekancangan, proses pembangunan infrastruktur langsung dimulai. Namun saat ini, dia memastikan Detail Engineering Design (DED) sudah disusun. Nantinya, konsep pembangunan infrastruktur di lahan tersebut terbagi menjadi 90 persen *softscape* dan 10 persen *hardscape*. Konsep *softscape* yang dimaksud adalah adanya pembangunan elemen hidup. Baik tanaman, rumput, bunga, maupun pohon yang mendominasi. Sedangkan sisanya berupa batu, jalan setapak, dinding, maupun infrastruktur keras lainnya.

Penataan elemen pendukung kawasan hutan kota itu akan dilakukan sesuai dengan filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Sebab, lokasinya berada di area kawasan Sumbu Filosofi Jogjakarta. "Pohon yang dipilih nanti akan menyesuaikan filosofi tersebut," tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebutkan, pembangunan ruang terbuka

hijau itu merupakan bagian dari penataan kawasan Jalan Malioboro yang masih masuk ke dalam area Sumbu Filosofi. "ABA ke depan jadi ruang terbuka hijau sudah diskusi juga itu nanti jadi hutan kota," ujarnya.

Penataan juga rencananya akan dilaksanakan di beberapa lokasi terdekat dengan hutan kota. Khususnya parkir yang berada di sepanjang Jalan Pasar Kembang. Penataan itu sesuai dengan instruksi Gubernur DIJ Ha-

mengku Buwono (HB) X.

Dua lokasi TKP terdekat dengan Malioboro dalam proses optimalisasi pembangunan. Misal TKP Beskalan dan Ketandan yang disiapkan. TKP Ketandan rencananya akan disambungkan dengan TKP Sriwedani. Namun, saat ini masih dalam kajian sirkulasi kendaraan seperti manuver dan sebagainya.

"Kemarin DED sudah dipaparkan kita cuma masih ada revisi," jelasnya. (oso/eno/fj)

## Siapkan Lahan Parkir Bus Pariwisata di Giwangan, Akan Difungsikan Lebaran

**PEMERINTAH** Provinsi DIJ maupun Pemerintah Kota Jogja tengah menyiapkan tempat khusus parkir (TKP) bus pariwisata tambahan di Giwangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung rencana larangan atau pembatasan bus pariwisata masuk kota.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, setelah TKP Abu Bakar Ali (ABA) dipindah, lahan seluas 2,6 hektare di Giwangan tengah disiapkan. "Ini wisatawan mau seperti apa, beliau (gubernur, Red) menyampaikan ke kami optimalkan 2,6 hektare di Giwangan," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (1/2).

Hal ini turut dilakukan karena Pemprov DIJ akan melakukan penataan TKP Senopati. "Penataan Senopati tidak untuk bus. Makanya kami perlu koordinasi dengan kota bagaimana sesegera mungkin Giwangan disiapkan," bebernya.

Ia menegaskan, upaya penataan tidak dilakukan serta merta. Forum diskusi antarinstansi terkait terus dijalankan.

Salah satunya membahas manajemen *traffic* dan pengaturan lalu lintas lainnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengaku, jajarannya tengah mendalami kajian rencana pemanfaatan lahan untuk parkir bus pariwisata di Giwangan. Sambil melakukan kajian, pembangunan awal di lokasi tersebut juga sudah dimulai. "Sudah (mulai, Red) tapi saya belum cek lagi, intinya dalam waktu dekat sudah kelar," ujarnya.

Saat ditanya apakah lokasi di Giwangan dapat digunakan saat mudik Lebaran 2026, Wawan pun mengemukakan, "Iya (bisa digunakan, Red)," tegasnya. Sedangkan rencana pemindahan TKP Senopati juga masih dalam kajian. Dalam memutuskan kebijakan tersebut, Pemkot Jogja tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkoordinasi dengan Pemprov DIJ melalui dinas perhubungan (dishub).

"Tidak mungkin juga kota sendiri. Kami perlu koordinasi dengan dishub provinsi juga," ucapnya. (oso/eno/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005